



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**





KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun bejalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan 2025 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2025) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategi, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan

Lamongan, Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



NIP. 19651021 198602 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU (TAHUN 2024)

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP



Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan Capaian
Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun
2025

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan
- 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP
Kabupaten Lamongan tahun 2025
- 3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan Capaian tahun berjalan s/d Triwulan II pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan perkiraan capaian s/d Triwulan I tahun 2025 sebagaimana Tabel T-C.2.1



Tabel T-C.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Bulan Maret Tahun 2025

Nomor					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2025 s/d Bulan Februari 2025		Catatan/ Keterangan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					Wajib									
2	18				Penanaman Modal Daerah									
2	18	01	1	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP	83.5	83.2	83.2	98.82		83.5	-	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	-	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	
2	18	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan		
2	18	01	2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	15 Laporan	2 Laporan	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	-	27 org	27 Orang	27 Orang	100%	27 Orang	27 Orang	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	-	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	3 Laporan	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	100%	6 Administrasi	1 Administrasi	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	22 Paket	22 Paket	22 Paket	100%	22 Paket	5 Paket	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	1 Paket	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	1 Paket	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	1 Dokumen	
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	-	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	1 Laporan	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	1 Laporan	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	1 Jenis	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	1 Jenis	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	1 Unit	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	33 Unit	33 Unit	33 Unit	100%	33 Unit	0	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	0	
2	18	02			Program PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65.7%	65.20%	65.20%	65.20%	100%	65.70%	0	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	35 %	35 %	35 %	100%	35 %	13 %	
2	18	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	3 Dokumen	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	35%	35%	35%	100%	35%	-	
2	18	02	2.02	02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	1 Updating Data	1 Updating Data	1 Updating Data	100%	1 Dokumen	-	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	80%	80%	80%	100%	90%	-	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	
2	18	03	2.01	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun	3.860 Izin	31.379 Izin	31.379 Izin	31.379 Izin	100%	3.860 Izin	3.505 izin	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penyelesaian izin melalui system OSS dan sistem daerah	2.653 Izin	31.379 Izin	31.379 Izin	31.379 Izin	100%	2.653 Izin	3.505 Izin	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	-	29.884 Pelaku Usaha	29.884 Pelaku Usaha	29.884 Pelaku Usaha	100%	5.000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	
2	18	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	-	750 Orang	750 Orang	750 Orang	100%	750 Orang	-	
2	18	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas	-	-	-	-	-	30 Kegiatan Usaha	-	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha								
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67.03%	66.53%	66.53%	66.53%	100%	67.03%	16%
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	2
2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	75 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	100%	75 Kegiatan Usaha	12	
2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100%	20 Pelaku Usaha	3	
2	18	05	2.01	03	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	100%	300 Kegiatan Usaha	-	
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal	3%	2.5%	2.5%	-	100%	3%	-



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						yang Dikelola								
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	63 Perijinan	63 Perijinan	63 Perijinan	63 Perijinan	-	63 Perijinan	0 Perijinan	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	-	65 Dokumen	0 Dokumen	



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2025	2025	2026		2023	2024	2025	
1	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	-	-	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	-13%	2.0%	2.5%	3.0%	Renstra 2021-2026
2	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	-	-	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	82%	2.0%	2.5%	3.0%	Renstra 2021-2026
3	Prosentase Penyelesaian Izin tepat waktu	-	-	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	99.71%	99.57	99.71	99.71	Renstra 2021-2026
4	IKM/SKM	-	-	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	89.08	83.85	88.97	89.08	Renstra 2021-2026
5	NILAI SAKIP DPMPTSP	-	-	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84	87.75	86.81	88.15	88.24	Renstra 2021-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai 3,55 – 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi investasi.
2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman



Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (satu), **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan”**, dengan **Sasaran prioritas “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian”**. Target yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) 5,2 pada tahun 2025.
2. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator melalui usaha pada tahun 2024:
(menuju 40)
 - a. Jumlah prosedur 5
 - b. Waktu (hari) 4
3. Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 47.46 pada tahun 2024.
4. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%) 37.42 pada tahun 2024.
5. Nilai realisasi PMA dan PMDN industry pengelolaan (Rp Triliun) 10.02 pada tahun 2025.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat



dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJM Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 yakni:

TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) **Kejayaan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) **Berkelanjutan** adalah menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan**” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Melalui penguatan investasi, pengembangan desa mandiri berbasis potensi lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, misi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa.

Misi 2.

Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada pemenuhan layanan dasar yang merata, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan kompetensi generasi muda, serta penguatan pendidikan karakter, diharapkan terwujud insan-insan Lamongan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Misi 3.

Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Dan Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi tiga yakni peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem transportasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang merata hingga pelosok desa. Di saat yang sama, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.



Misi 4.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan sosial sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan peran aktif seluruh elemen masyarakat—termasuk perempuan, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya—didorong untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkeadilan.

Misi 5.

Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif, dengan penjelasan sebagai berikut :

Fokus misi ke lima adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah tantangan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi Lamongan diarahkan menjadi lebih integratif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit utama. Reformasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Misi 5 (lima) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan



sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan Realisasi Investasi Melalui Pelayanan Publik Yang Inovatif (Misi 1)
Indikator : Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Realisasi Investasi Melalui Pelayanan Publik Yang Inovatif (Misi 5)
Indikator : Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi

Sasaran

1. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Misi 1)
Indikator :
 - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN
 - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan (Misi 5) Indikator :
 - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Misi 5)
Indikator :
 - Nilai SKM/IKM
 - Nilai SAKIP
 - Nilai Manajemen Resiko (MR)

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tujuan Dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN		2025	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5
Meningkatkan Efektifitas Investasi	Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	1. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	3%	3%



TUJUAN	SASARAN		2025	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5
		2. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	3%	3%
		3. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99.71%	99.71%
Meningkan pelayanan publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	SKM	89.08	89.08
	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP	88.24	88.24

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah terdiri dari 6 program dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.955.144.095,- (Empat Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Satu Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulnan, Triwulanan/
Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



II. Program pengembangan iklim penanaman modal

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota

Sub kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.



- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Pelaksanaan Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (Satu) yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”, dan Misi ke 5 (Lima) yaitu “Menghancurkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mendukung Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.



Tabel. 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Penggeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
1					2	3				4		5			6
2	18				Penanaman Modal Daerah							5.182.361.544	4.955.144.095	(227.217.449)	
2	18	01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.5	Prosentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.5			4.714.167.644	4.553.045.195	(161.122.499)	
2	18	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	17.000.000	11.927.301	(5.072.699)	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	8.500.000	5.700.000	(2.800.000)	
2	18	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	2 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi	2 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	8.500.000	6.227.301	(2.272.699)	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	3.226.107.694	3.219.519.944	(6.587.750)	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 Orang	DPM PTSP	DPM PTSP	3.209.107.694	3.209.107.694	0	
2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	8.500.000	5.162.250	(3.337.750)	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran akhir tahun	14 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	8.500.000	5.250.000	(3.250.000)	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Dipenuhi	2 Administrasi	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi	2 Administrasi	DPM PTSP	DPM PTSP	-	-	-	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	DPM PTSP	DPM PTSP	-	-	-	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	20 orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	DPM PTSP	DPM PTSP	-	-	-	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	DPM PTSP	DPM PTSP	106.024.000	67.012.000	(39.012.000)	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 Paket	Jumlah alat Listrik dan elektronik	22 Paket	DPM PTSP	DPM PTSP	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi	6 Paket	DPM PTSP	DPM PTSP	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4 Paket	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	14.000.000	(6.000.000)	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	12.000.000	(8.000.000)	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Dokumen	Jumlah bahan bacaan	8 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	8.000.000	8.000.000	0	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	5 Laporan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	5 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	8.024.000	4.012.000	(4.012.000)	
2	18	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	Jumlah makan dan minum	5 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan	2 jenis	Jumlah jenis pengadaan	2 jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	-	12.000.000	12.000.000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	-	-	-	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	-	12.000.000	12.000.000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	1.032.586.000	1.028.586.000	(4.000.000)	
2	18	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Jumlah rekening yg dibayar	4 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	337.482.000	337.482.000	0	
2	18	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	3 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	13.000.000	9.000.000	(4.000.000)	
2	18	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	Jumlah tenaga administrasi	3 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	682.104.000	682.104.000	0	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	DPMPTSP	DPMPTSP	332.449.950	213.999.950	(118.450.000)	
2	18	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	15 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	28.450.000	26.000.000	(2.450.000)	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	15.000.000	14.000.000	(1.000.000)	
2	18	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	Jumlah peralatan dipelihara	33 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	245.000.000	130.000.000	(115.000.000)	
	18	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	Jumlah gedung yg dipelihara	2 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	43.999.950	43.999.950	0	
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase peningkatan minat Investor	65.70%	Prosentase peningkatan minat Investor	65.70%	DPM PTSP	DPM PTSP	20.140.000	14.040.000	(6.100.000)	
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Jenis Kemudahan Berusaha dan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	35%	DPM PTSP	DPM PTSP	5.000.000	2.700.000	(2.300.000)	
2	18	02	2,01	02	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	5.000.000	2.700.000	(2.300.000)	
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	DPM PTSP	DPM PTSP	15.140.000	11.340.000	(3.800.000)	
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Peta Data Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	15.140.000	11.340.000	(3.800.000)	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	DPM PTSP	DPM PTSP	59.000.000	53.300.000	(5.700.000)	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Promosi	2 Kegiatan	DPM PTSP	DPM PTSP	59.000.000	53.300.000	(5.700.000)	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Penanaman Modal								
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	59.000.000	53.300.000	(5.700.000)		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Dalam Satu Tahun	3860 Izin	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Dalam Satu Tahun	3860 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	174.053.000	189.603.900	15.550.000		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2653 Izin	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2653 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	174.053.900	189.603.900	15.550.000		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	159.053.900	181.103.900	22.050.000		
2	18	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	750 Orang	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	750 Orang	DPM PTSP	DPM PTSP	15.000.000	8.500.000	(6.500.000)		
2	18	04	2.01	03	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas	30 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	-	-	-		



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha							
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67.03%	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67.03%	DPM PTSP	DPM PTSP	214.500.000	134.587.500	(79.912.500)
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	DPM PTSP	DPM PTSP	214.500.000	134.587.500	(79.912.500)
2	18	05	2.01	01		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 Kegiatan Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	35.000.000	22.500.000	(12.500.000)
2	18	05	2.01	02		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	85.038.200	56.838.200	(28.200.000)
2	18	05	2.01	03		Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan	300 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	94.461.800	55.249.300	(39.212.500)



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

							Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	3%	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	3%	DPM PTSP	DPM PTSP	500.000	10.567.500	10.067.500	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	63 Perijinan	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	63 Perijinan	DPM PTSP	DPM PTSP	500.000	10.567.500	10.067.500	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	65 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	65 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	500.000	10.567.500	10.067.500	

Lamongan, Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



HAZAHARI, M.M.

Plombina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),



sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lamongan, Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



HAMDANI AZAHARI, M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003